



Sekber Malioboro Disoal

JOGJA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIJ diminta mengkaji ulang rencana peluncuran lembaga baru yang menangani Malioboro pada akhir Agustus ini. Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto. Secara terbuka Eko mempertanyakan keberadaan lembaga yang nantinya bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Malioboro tersebut. "Untuk apa dibentuk sekber itu. Apa urgensinya," kritik Eko kemarin (20/8) ■

► Baca Sekber... Hal 7

■ SEKBER...

Sambungan dari hal 1

Eko memasalahkan ruang lingkup dan kewenangan sekber tersebut. Apalagi dalam beberapa kali, Sekprov DIJ Gatot Saptadi menginformasikan dalam struktur Sekber Malioboro melibatkan

anggota TNI. Khususnya dari Korem 072/Pamungkas. "Kok ada TNI segala," ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Eko menegaskan, banyaknya lembaga yang menangani satu persoalan seperti Malioboro mengindikasikan tidak efektifnya kinerja birokrasi. Sebab, sejak

beberapa tahun lalu Pemkot Jogja telah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro di bawah Dinas Pariwisata Kota Jogja.

Mestinya, sambung Eko, UPT Malioboro tersebut yang diperkuat. Bukan malah membentuk lembaga baru. Bagi dia,

lembaga semacam UPT sudah cukup untuk menangani persoalan Malioboro. "Seharusnya ungkapan miskin struktur kaya fungsi yang dikedepankan," pintanya.

Tidak ingin berspekulasi lebih jauh, Eko berencana memanggil Sekprov DIJ sebagai

ketua Baperjakat, Kepala Badan Kpegawainan Daerah (BKD) Agus Supriyanto, serta Kepala Biro Organisasi Setprov DIJ YB Jarot Budi Harjo pada Kamis (28/8) guna membahas masalah tersebut. Termasuk penataan kelembagaan terkait banyaknya posisi kepala instansi yang lowong. "Masalah Sekber Malioboro akan kami tanyakan," ujar politisi alumnus GMNI ini.

Sekprov DIJ Gatot Saptadi tercatat dua kali bicara masalah pembentukan Sekber Malioboro. Pertama, saat rapat kerja dengan Komisi C DPRD DIJ pada Senin (14/8). Saat itu Gatot masih menjabat Assekprov Perekonomian dan Pembangunan merangkap pelaksana tugas (Plt) kepala Dinas Perhubungan DIJ.

Kedua, usai dilantik sebagai Sekprov pada Selasa (15/8). Gatot mengakui, salah satu pekerjaan terbesar adalah menata kawasan semi pedestrian Malioboro yang ditargetkan tuntas pada 2019.

Maka dibentuklah Sekber Malioboro paling lambat hingga akhir Agustus ini. Draf keputusan terkait Sekber Malioboro juga telah berada di mejanya.

Fungsi sekber itu meliputi pembangunan, pengelolaan, dan edukasi. Sekber juga bertugas melakukan pengawasan di kawasan Malioboro. Gatot menampik tudingan bahwa Sekber Malioboro akan tumpang tindih den-

gan UPT Malioboro. Menurut dia, ada pembagian tugas dan kewenangan di antara kedua lembaga itu.

Ruang lingkup sekber tak terbatas di Malioboro. Namun menyangkut kawasan yang berada di luar Malioboro. "Termasuk pengaturan dan pengelolaan parkir di Taman Parkir Ngabean. Sekber bicaranya kawasan," jelasnya.

Gatot juga menginformasikan, sekber akan diperkuat aparat keamanan dari unsur TNI. Khususnya dari Korem 072/Pamungkas. Dengan terlibatnya aparat TNI, Gatot ingin penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi menjadi lebih efektif.

"Kalau sudah keterlaluhan dan tidak bisa dikasih tahu, berarti dibutuhkan tindakan represif," tegas mantan penjabat bupati Sleman itu.

Sebelumnya, Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto mengatakan, kawasan Malioboro akan menjadi pusat perekonomian dan pariwisata DIJ. Sayangnya, pembangunan di kawasan itu berjalan lambat dan tidak pernah selesai. Salah satu penyebabnya, pengelolaan Malioboro ditangani pemkot dan pemprov. "Maka dibutuhkan sebuah lembaga yang fokus menangani dan menyinergikan pembangunan di kawasan Malioboro," katanya.

Sekber Malioboro akan melaku-

kan percepatan pembangunan Malioboro. Anggota yang duduk di sekber juga melibatkan unsur pemkot dan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov.

Kawasan Malioboro yang menjadi perhatian sekber di antaranya, pembangunan pedestrian di sekitar Stasiun Tugu, pengelolaan parkir di Kotabaru, hingga manajemen lalu lintas Jalan Mataram dan Jalan Bhayangkara.

Terpisah, anggota Komisi C DPRD DIJ Chang Wendryanto menilai, kunci utama penanganan persoalan Malioboro adalah penegakan aturan. Peraturan yang ada tidak ditegakkan secara optimal.

Chang yang tinggal di kawasan Pajeksan, tak jauh dari Malioboro menyesalkan kinerja UPT Malioboro. Dia menengarai UPT Malioboro terkesan melakukan sejumlah pembiaran. Misalnya di sisi timur Malioboro. Dalam pengamatannya jumlah pedagang kaki lima justru bertambah. Padahal lokasi itu telah disterilkan dari parkir sepeda motor. "Ini ironis," sesalnya.

Chang mencurigai ada permainan di balik semua itu. Bahkan, dari investigasinya ada dugaan oknum aparat yang ikut andil dalam jual beli lahan di sisi timur Malioboro. "Saya sudah pernah bicarakan temuan ini dengan Danramil Danurejan," beber Chang. (kus/yog/ga)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005